

KEBUTUHAN RUMAH DAN UPAYA PENYEDIAAN RUMAH BAGI WARGA MISKIN DI KOTA SEMARANG

Maruf Setiawan [✉] & Ariyani Indrayati

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Februari 2015

Disetujui Mei 2014

Dipublikasikan Juni 2014

Keywords:

Housing Needs, Efforts to Provide Housing, Perception, The Poor

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) Memproyeksikan kebutuhan rumah bagi warga miskin di Kota Semarang untuk akhir tahun 2015 dan 2016 serta mengetahui sebarannya pada tiap kecamatan; 2) Mengetahui upaya penyediaan rumah bagi warga miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang; 3) Mengetahui persepsi upaya penyediaan rumah bagi warga miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah statistik deskriptif dan deskriptif kualitatif. Simpulan dalam penelitian ini yaitu: 1) Kebutuhan rumah bagi warga miskin pada akhir tahun 2015 sebanyak 65.448 unit dan meningkat menjadi sebanyak 67.555 unit pada akhir tahun 2016, sedangkan secara keruangan persebarannya berasosiasi dengan jumlah penduduk dan warga miskin; 2) Upaya penyediaan rumah bagi warga miskin meliputi penyusunan RP3KP, rumah susun, perbaikan rumah tidak layak huni dan bantuan sosial bidang pemugaran rumah tidak layak huni berbasis masyarakat; 3) Berdasarkan persepsi khusus, mayoritas bantuan telah layak huni, kecuali di rumah susun Bandarharjo dan pada bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kecamatan Semarang Utara. Berdasarkan persepsi umum, untuk bantuan perbaikan rumah tidak layak huni belum maksimal karena dipersepsikan agak buruk.

Abstract

This study aims (1) to projecting the housing needs for the poor in the Semarang City at the end of 2015 and 2016, and knowing its distribution in each district; (2) to know the effort to provide housing for the poor is done by the Government of Semarang City; (3) to know the perception of the efforts to provide housing for the poor is done by the Government of Semarang City. The method research used is the statistic descriptive and descriptive qualitative. The conclusions in this research are : 1) The housing needs for the poor at the end of 2015 as many as 65.448 unit and increased to as many as 67.555 units at the end of 2016, while the spatial distribution associates with a number of people and the poor; 2) Efforts to provide housing for the poor include drafting RP3KP, flats, home improvement uninhabitable and social assistance field of restoration the house is not livable community-based; 3) Based on special perception, the majority of aid was livable, except in towers Bandarharjo and the aid repair uninhabitable housing in the District of North Semarang. Based on the general perception, improvement of uninhabitable housing is not maximized due to the perceived rather badly.

© 2015 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C1 Lantai 1 FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: geografiunnes@gmail.com

ISSN 2252-6285

PENDAHULUAN

Urusan perumahan menjadi urusan yang penting, karena perumahan merupakan kebutuhan yang pokok dan wajib dipenuhi demi kesejahteraan masyarakat. Masih banyak masyarakat Kota Semarang yang belum memiliki rumah layak huni dan yang tinggal di kawasan kumuh (Rencana Kerja Pembangunan Daerah, 2014). Angka backlog atau kebutuhan rumah yang belum terpenuhi di Semarang terbilang tertinggi dibandingkan daerah lain di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data (BPS) 2010, angka backlog di Semarang mencapai 271.000 unit. Jumlah tersebut dipastikan terus bertambah (www.rasikasemarang.com, diakses 10 November 2014).

Salah satu tujuan/sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2014 adalah penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah dan fasilitas pendukungnya. Tetapi terdapat permasalahan berupa masih adanya permukiman kumuh, rumah yang tidak layak huni dan keterbatasan masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk memiliki rumah yang layak huni.

Nugroho dan Sugiri (2009) menemukan beberapa masalah kebijakan pembangunan terhadap permasalahan perumahan dan permukiman di Kota Semarang. Permasalahan tersebut meliputi kurang tegasnya pemerintah dalam memberikan izin bangunan, belum dapat diimbangi dengan fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, kebijakan dianggap tidak sesuai dengan permasalahan yang ada dan kebijakan yang dikeluarkan tersebut tidak mengena pada akar permasalahan yang

sesungguhnya, serta kebijakan penanganan perumahan dan permukiman tidak efektif.

Uraian di atas menunjukkan masalah penyediaan rumah di Kota Semarang salah satunya disebabkan karena jumlah kebutuhan rumah terutama bagi warga miskin tidak diketahui secara pasti, sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan rumah masih tetap saja kurang. Indikasi lainnya adalah upaya penyediaan rumah bagi warga miskin oleh Pemerintah Kota Semarang yang belum optimal, sehingga perlu untuk diketahui lebih mendalam dan bagaimana pula persepsi warga miskin selaku penerima bantuan terkait upaya tersebut.

METODE PENELITIAN

Sampel untuk memproyeksikan kebutuhan rumah bagi warga miskin di Kota Semarang pada akhir tahun 2015 dan 2016 adalah seluruh populasi penduduk maupun warga miskin yang terdapat di Kota Semarang, sehingga teknik pengambilan sampelnya disebut dengan *total sampling*. Tujuan penelitian kedua berupa mengetahui upaya penyediaan rumah bagi warga miskin di Kota Semarang, narasumber atau informan meliputi instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermasper dan KB). Penelitian mengenai persepsi terhadap upaya penyediaan rumah bagi warga miskin, sampel yang diambil adalah warga yang mendapat bantuan rumah dari Pemerintah Kota Semarang. Teknik pengambilan sampelnya adalah *proporsional random sampling*. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan jumlah sub-populasi penerima bantuan rumah

dari Pemerintah Kota Semarang. Jumlah anggota sampel yang dipilih sebesar 5% untuk masing-masing populasi. Populasi penerima bantuan rumah susun sebanyak 1.463 KK dengan sampel 73 KK, dan penerima bantuan perbaikan rumah sebanyak 576 KK dengan sampel 32 KK untuk setiap kecamatan.

Penelitian mengenai persepsi terhadap upaya penyediaan rumah bagi warga miskin tidak dilakukan untuk bantuan sosial bidang pemugaran rumah tidak layak huni berbasis masyarakat yang diberikan oleh Bapermasper dan KB Kota Semarang, dikarenakan hanya bersifat fasilitasi pendanaan sehingga perbaikan rumah dilakukan oleh penerima bantuan sendiri.

Analisis data untuk perhitungan kebutuhan rumah bagi warga miskin menggunakan metode statistik deskriptif, dengan menggunakan rumus matematis yang diolah secara manual dan bantuan perangkat lunak *Microsoft Excel*. Analisis data untuk upaya penyediaan rumah bagi warga miskin oleh Pemerintah Kota Semarang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Analisis data untuk persepsi terhadap upaya penyediaan rumah bagi warga miskin juga dilakukan dengan metode statistik deskriptif, dengan bantuan perangkat lunak *SPSS* dan *Microsoft Excel* untuk pengolahan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berdasarkan pada tujuan penelitian, sehingga dapat menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian ini disajikan dengan menggunakan analisis data yang sesuai pada metode penelitian.

Kebutuhan Rumah Bagi Warga Miskin

Perhitungan kebutuhan rumah untuk seluruh penduduk maupun warga miskin berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, jumlah rumah tangga dan jumlah rumah. Kebutuhan rumah bagi warga miskin diketahui berdasarkan proporsi hunian berimbang. Kebutuhan rumah total diketahui berdasarkan hasil penjumlahan backlog dan kebutuhan rumah akibat pertumbuhan penduduk. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan proporsi hunian berimbang 1:2:3 (1 rumah mewah lebih dari 200 m², 3 rumah sedang/menengah antara 150 m², 6 rumah sederhana/kecil antara 72 m²).

Kebutuhan rumah di Kota Semarang pada akhir tahun 2015 diproyeksikan sebanyak 109.147 unit, sehingga melalui pembangunan hunian berimbang meliputi 10.915 unit rumah mewah, 32.744 unit rumah sederhana dan bagi warga miskin 65.488 unit rumah sederhana. Pada akhir tahun 2016 diproyeksikan meningkat menjadi sebanyak 112.5922 unit rumah, meliputi 11.259 unit rumah mewah, 33.777 unit rumah menengah dan bagi warga miskin sebanyak 67.555 unit rumah sederhana. Kebutuhan rumah tertinggi di Kecamatan Ngaliyan sebanyak 16.928 unit dengan 9.779 unit bagi warga miskin dan terendah di Kecamatan Semarang Tengah dengan 2.323 unit dengan 1.394 unit bagi warga miskin.

Tingginya kebutuhan rumah di Kota Semarang ini tentu saja dapat menimbulkan berbagai masalah, utamanya pada warga miskin. Permasalahan yang dapat timbul diantaranya adalah adanya permukiman kumuh maupun liar. Kebutuhan rumah yang tergolong besar, baik bagi seluruh penduduk maupun warga miskin tentu harus dapat ditangani oleh Pemerintah Kota Semarang maupun pihak-pihak lainnya yang terkait.

Penyediaan rumah, baik dalam bentuk horisontal maupun vertikal berupa rumah susun sudah pasti membutuhkan jumlah yang sangat banyak, agar dapat memenuhi seluruh lapisan golongan masyarakat. Pembangunan rumah susun selain dilihat kebutuhan jumlahnya, juga perlu diperhatikan kualitas bangunan, lingkungan, sarana dan prasarananya agar memberikan kenyamanan dalam bertempat tinggal. Perlu pula untuk diperhatikan kesesuaian dengan kemampuan masyarakat yang akan menghuni rumah susun tersebut, mengingat peruntukannya bagi warga miskin yang sudah jelas memiliki kemampuan ekonomi terbatas.

Kebutuhan rumah bagi warga miskin berasosiasi keruangan dengan jumlah warga miskin dan jumlah penduduk. Jumlah warga miskin diproyeksikan relatif seragam di bagian tengah Kota Semarang, sedangkan jumlah penduduk terbanyak di pinggiran bagian wilayah tersebut. Pada bagian tengah wilayah Kota Semarang memiliki kebutuhan rumah yang rendah bagi warga miskin. Kebutuhan rumah tertinggi sebagian besar berada di bagian wilayah pinggiran Kota Semarang. Wilayah tersebut seperti Kecamatan Genuk, Semarang Selatan, Tembalang, Banyumanik dan Ngaliyan.

Apabila dilihat berdasarkan aspek keruangan, pada bagian tengah wilayah Kota Semarang memiliki kebutuhan rumah yang rendah bagi warga miskin. Hal ini dikarenakan pada bagian tersebut jumlah penduduk maupun warga miskin juga lebih rendah. Kebutuhan rumah tertinggi sebagian besar berada di bagian wilayah pinggiran Kota Semarang, seperti Kecamatan Genuk, Semarang Selatan, Tembalang, Banyumanik dan Ngaliyan. Beberapa wilayah kecamatan tersebut harus diprioritaskan untuk diberikan

bantuan rumah oleh Pemerintah Kota Semarang.

Upaya Penyediaan Rumah Bagi Warga Miskin di Kota Semarang

Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam penyediaan rumah bagi warga miskin diketahui melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) serta Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermasper dan KB) Kota Semarang.

Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan jika instansi Bappeda Kota Semarang tidak melakukan upaya penyediaan rumah bagi warga miskin secara langsung. Hal ini dikarenakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Semarang yang secara umum merupakan instansi penyusun perencanaan daerah. Upaya penyediaan rumah bagi warga miskin akan dilaksanakan secara langsung oleh instansi lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terkait.

Terkait dengan kebutuhan rumah bagi warga miskin, Bappeda Kota Semarang telah melakukan perhitungan kebutuhan rumah bagi warga miskin. Hal ini dapat dilihat dari adanya perhitungan kebutuhan rumah dengan proporsi hunian berimbang yang dihitung hingga tahun 2031, sebagai tahun perencanaan.

Rumah Susun

Pembangunan rumah susun dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, namun dalam pengelolaannya dilimpahkan kepada DTKP Kota Semarang melalui UPTD Rumah Sewa.

Rumah susun di Kota Semarang meliputi Rusun Kaligawe, Karangroto, Pekunden, Genuk, Bandarharjo dan Plamongsari. Rusun Kudu hingga waktu penelitian masih dalam tahap pembangunan dan penghunian. Jumlah penghuni rumah susun hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 1.463 KK. Pembangunan rumah susun lebih diprioritaskan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah maupun menjadi korban penggusuran.

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Perbaikan rumah tidak layak huni merupakan upaya penyediaan rumah bagi warga miskin yang dilaksanakan oleh DTKP Kota Semarang, program lainnya adalah penataan kawasan permukiman kumuh. Program lainnya adalah penataan kawasan permukiman dalam lingkup kecil seperti perbaikan saluran drainase, pavingisasi jalan dan pengaspalan jalan skala kecil atau gang.

Dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni untuk warga miskin dialokasikan sebesar Rp. 10.000.000 per unit rumah yang berasal dari APBD Murni maupun Perubahan Kota Semarang tahun 2014. DTKP Kota Semarang tidak dapat membangun unit rumah baru dikarenakan dana anggaran yang terbatas. Anggaran dana tersebut dinilai masih sangat kurang, DTKP Kota Semarang menilai anggaran dana yang ideal untuk perbaikan rumah adalah sebesar Rp. 20.000.000 per unit rumah. DTKP Kota Semarang mengharapkan adanya anggaran baru agar dapat membangun unit rumah bagi warga miskin.

Perbaikan rumah dapat dilakukan melalui pengajuan oleh warga, kelurahan, kecamatan, aspirasi anggota DPRD maupun dari DTKP Kota Semarang sendiri apabila tidak ada pengajuan perbaikan rumah. Indikator memperoleh

bantuan perbaikan rumah meliputi terdata sebagai warga miskin, memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan serta kondisi rumah tidak layak huni.

Bantuan perbaikan rumah tidak diberikan dalam bentuk dana tunai, melainkan diwujudkan dengan pemberian material bangunan beserta tenaga kerja, sehingga penerima bantuan tidak perlu melakukan perbaikan rumah sendiri. Pada tahun 2014 DTKP Kota Semarang berhasil melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 576 unit rumah. Pada tahun 2015 ditargetkan perbaikan 412 unit rumah, namun masih dapat bertambah melalui APBD Perubahan. Diestimasikan jumlah rumah tidak layak huni di Kota Semarang tahun 2014 lebih dari 10.000 unit, sedangkan bantuan perbaikan rumah hanya 576 unit. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga masih terdapat banyak rumah yang belum mendapatkan bantuan perbaikan.

Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Masyarakat

Program ini dilaksanakan oleh Bapermasper dan KB Kota Semarang, hanya saja bentuk program berupa bantuan fasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga kelurahan di Kota Semarang yang tidak mampu memperbaiki rumah dengan biaya sendiri. Pada program ini Bapermasper dan KB Kota Semarang akan membantu masyarakat dalam pengajuan proposal perbaikan rumah yang akan ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Bentuk dan jenis kegiatan meliputi pemugaran rumah dan pemugaran rumah model panggung. Tujuan dari bantuan sosial bidang pemugaran rumah tidak layak huni berbasis masyarakat meliputi; memotivasi masyarakat dalam rangka

peningkatan kualitas perumahan, menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Penerima bantuan stimulan pemugaran rumah tidak layak huni diutamakan bagi warga berpenghasilan rendah dan atau terkena musibah bencana alam. Penerima bantuan sosial stimulan pemugaran rumah model panggung diutamakan bagi warga berpenghasilan rendah dengan kriteria sama dengan penerima bantuan pemugaran rumah, ditambah kriteria tinggal di lokasi yang setiap tahun mengalami banjir atau genangan rob air laut dalam waktu beberapa hari.

Hingga tahun 2014 Pemerintah Kota Semarang belum mampu untuk menyediakan unit rumah baru bagi warga miskin, hal ini sebagai akibat ketiadaan anggaran. Panudju (1999) menjelaskan bahwa pengadaan perumahan kota dalam jumlah besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) di negara-negara berkembang merupakan persoalan yang cukup kompleks dan menghadapi banyak kendala. Hal ini juga dialami oleh Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Salah satu kendala yang diuraikan pun dialami oleh Kota Semarang, dimana berdasarkan hasil penelitian diketahui berupa kendala pembiayaan. Maka dari itu Pemerintah Kota Semarang dirasa perlu untuk mengkaji penambahan anggaran sebagai upaya penyediaan rumah bagi warga miskin.

Persepsi Terhadap Upaya Penyediaan Rumah Bagi Warga Miskin

Berdasarkan persepsi khusus, nilai total persepsi bantuan rumah susun berkisar antara 46,05 sampai dengan 66,25

atau rata-rata 56,99, dimana nilai batas wajar adalah 46,5. Persepsi penerima bantuan tertinggi adalah di rumah susun Pekunden, Semarang Tengah dengan nilai 66,25 sedangkan terendah di Bandarharjo, Semarang Utara dengan nilai 46,05. Berdasarkan perhitungan tersebut, hanya bantuan rumah susun di Bandarharjo, Semarang Utara tidak layak huni, dikarenakan berada dibawah nilai wajar.

Skor total persepsi khusus bantuan perbaikan rumah tidak layak huni berkisar antara 27 sampai 48,5, dimana skor rata-rata adalah 38,15 atau kriteria Baik. Skor persepsi penerima bantuan tertinggi adalah di Kecamatan Candisari dengan nilai 48,5 atau kriteria Baik Sekali. Skor persepsi terendah di Kecamatan Semarang Utara dengan nilai 27 atau kriteria Agak Buruk, sehingga hanya perbaikan rumah di kecamatan ini yang dipersepsikan masih tidak layak huni.

Berdasarkan hasil penelitian persepsi khusus, baik bantuan rumah susun maupun perbaikan rumah tidak layak huni mayoritas menunjukkan hasil yang positif. Tetapi perlu bantuan tambahan dikarenakan masih terdapat penerima bantuan yang memiliki persepsi tidak layak huni.

Berdasarkan persepsi umum, jumlah nilai persepsi penerima bantuan rumah susun mencapai 66,60% atau kriteria baik, sedangkan pada penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni hanya 26,17% atau kriteria agak buruk. Hal ini menunjukkan bantuan penyediaan rumah melalui perbaikan rumah tidak layak huni belum maksimal.

Terdapat perbedaan persepsi terhadap upaya Pemerintah Kota Semarang yang meliputi aspek peningkatan ekonomi, usaha perbaikan lingkungan, aspirasi dan peran serta, sosialisasi bantuan, pemberdayaan masyarakat dan juga transparansi.

Persamaan persepsi hanya terdapat pada aspek bantuan pihak non pemerintah serta akses dan kemudahan layanan. Pada aspek yang memiliki perbedaan persepsi yakni, penerima bantuan rumah susun mayoritas memberikan persepsi positif. Hal ini berarti bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang pada aspek-aspek tersebut telah tersalurkan dengan baik kepada penerima bantuan penerima bantuan rumah susun. Hal ini bertolak belakang dengan penerima bantuan penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, dimana mayoritas penerima bantuan memberikan persepsi negatif.

Pada aspek yang memiliki persamaan persepsi, Pemerintah Kota Semarang telah memberikan akses dan kemudahan layanan dalam memberikan bantuan, hal ini ditunjukkan dengan persepsi yang mayoritas positif dari penerima bantuan. Bertolak belakang dengan akses dan kemudahan layanan, mayoritas penerima bantuan menganggap belum terdapat bantuan maupun peran dari pihak non pemerintah. Perbedaan persepsi penerima bantuan penerima bantuan disebabkan karena pelaksanaan upaya penyediaan rumah pada bantuan rumah susun lokasinya yang terkonsentrasi, sehingga lebih mudah diberikan bantuan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Kebutuhan rumah tertinggi di Kecamatan Ngaliyan dan terendah di Kecamatan Semarang Tengah, sedangkan Kecamatan Pedurungan mengalami kelebihan jumlah rumah. Kebutuhan

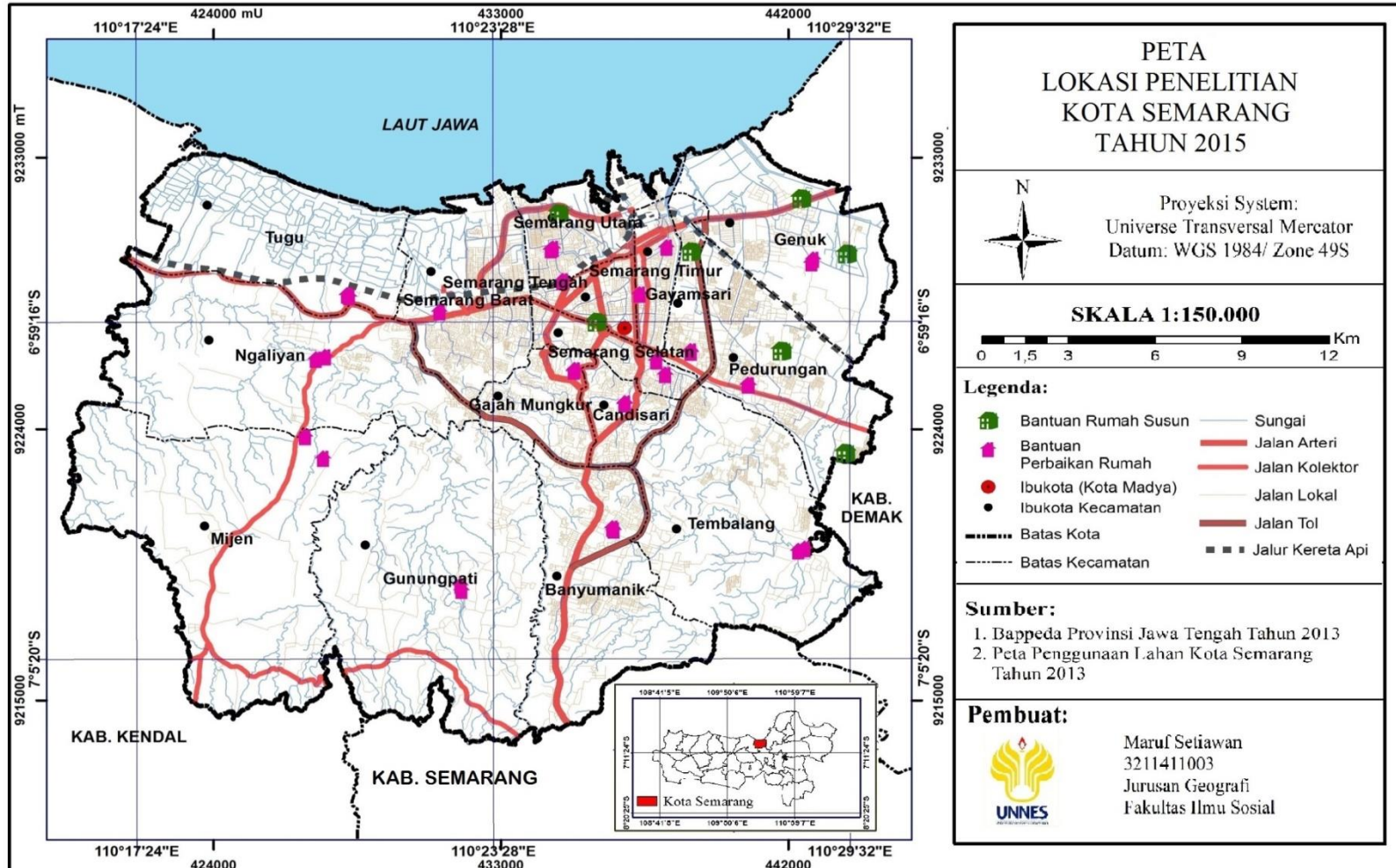
rumah tertinggi sebagian besar berada di bagian wilayah pinggiran Kota Semarang, seperti di Kecamatan Genuk, Semarang Selatan, Tembalang, Banyumanik dan Ngaliyan.

Masalah upaya penyediaan rumah bagi warga miskin di Kota Semarang ditemukan pada aspek pendanaan dan pelaksanaan.

Berdasarkan persepsi khusus, mayoritas bantuan rumah dipersepsikan telah layak huni, kecuali rumah susun di Bandarharjo dan pada bantuan perbaikan rumah di Kecamatan Semarang Utara yang dipersepsikan masih tidak layak huni. Berdasarkan persepsi umum, jumlah nilai persepsi penerima bantuan rumah susun menghasilkan kriteria baik, sedangkan pada penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni menghasilkan kriteria agak buruk yang berarti menunjukkan bantuan belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, Sri Moertiningsih dan Omas Bulan Samosir (Ed). 2010. *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta: Lembaga Demografi FE UI.
- Nugroho, Prihadi dan Agung Sugiri. 2009. *Studi Kebijakan Pembangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang di Kota Semarang*. Jurnal Jurusan Teknik PWK Universitas Diponegoro Semarang.
- Panudju, Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Jakarta: Alumni.
- Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2014*. 2014. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- <http://www.rasikasemarang.com/angka-backlog-di-semarang-tinggi/> (diakses 10 November 2014)



Peta Lokasi Penelitian di Kota Semarang Tahun 2015